

2024



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



BADAN PENGHUBUNG DAERAH DIY

Jalan Diponegoro No. 52 Menteng, Jakarta Pusat

Telp. : (021) 31938108; Fax : (0221) 3907508

Surel : kaperda@jogjaprov.go.id

Laman : kaperda.jogjaprov.go.id

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penghubung Daerah DIY Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Badan Penghubung Daerah DIY Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2024 diwarnai dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi. Namun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Badan Penghubung Daerah DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2022 – 2027. Proses penyusunan laporan ini membutuhkan kesiapan dan kerja keras dari seluruh jajaran instansi pemerintah terkait, agar dapat menghasilkan sebuah laporan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Jakarta, 13 Februari 2025

Kepala Badan Penghubung Daerah DIY,



Nugrohoningsih, S.I.P.

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Badan Penghubung Daerah DIY Tahun 2024 dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian tujuan “Meningkatnya capaian kinerja layanan penghubung dalam menunjang koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan lain di DKI Jakarta dan sekitarnya” :
 - Diukur dengan indikator Persentase layanan penghubung yang berkualitas dalam menunjang koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan lain dengan Meta Indikator : Jumlah penerima layanan yang ingin kembali mendapatkan fasilitas Banhubda DIY dibagi seluruh penerima layanan dikali 100%.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) Sasaran Strategis, yakni Meningkatkan Kualitas Layanan Penghubung dan Meningkatkan Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Perangkat Daerah.
 - Target capaian indikator tujuan tahun 2024 sebesar 87,5%; sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 92,68%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 105,92%.
 - Dibandingkan target capaian indikator tujuan tahun 2023 sebesar 100%; sampai dengan bulan Desember 2023 terealisasi 100%. Dengan demikian capaian ini melalui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikali 100%) mencapai 100%.
2. Capaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya Kualitas Layanan Penghubung”:
 - Diukur dengan indikator Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Layanan Penghubung dengan Meta Indikator : Jumlah Seluruh IKM Layanan yang diberikan dibagi jumlah jenis layanan yang diberikan.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) Program, yakni Program Pelayanan Penghubung dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;

- Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 87,5 angka indeks; sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 92,83 angka indeks. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 106,09%
 - Dibandingkan target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 91%; sampai dengan bulan Desember 2023 terealisasi 92,29%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 101,42%.
3. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Perangkat Daerah”:
- Diukur dengan indikator Kategori Reformasi Birokrasi Badan Penghubung Daerah DIY dengan Meta Indikator : Kategori nilai indeks Reformasi Birokrasi Badan Penghubung Daerah DIY.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar A (2); sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi A (2) dengan Nilai RB sebesar 88,43 (A) dengan Predikat “Memuaskan”. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%.
 - Dibandingkan target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar BB (3); sampai dengan bulan Desember 2023 terealisasi A (2) dengan Nilai RB 82,41 (A) dengan Predikat “Memuaskan”. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 133,3%

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Penghubung Daerah DIY ke depan, sebagai berikut:

1. Perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur implementasi kebijakan kelembagaan organisasi perangkat daerah, ketatalaksanaan dan SDM

aparatur telah melahirkan isu-isu strategis yang harus direspons dan diakomodir dalam penetapan dan pencapaian sasaran organisasi;

2. kemajuan teknologi informasi yang berkembang pesat mengharuskan setiap personil untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas kedinasan yang pemanfaatannya tidak hanya terbatas pada internal perangkat daerah tetapi juga antar dan seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. reformasi birokrasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dilaksanakan seluruh pemerintah daerah perlu ditindaklanjuti dengan rumusan konsep arah dan strategi reformasi birokrasi dalam bentuk Road Map Reformasi Birokrasi. Road map tersebut diharapkan dapat mendeksripsikan arah perubahan kedalam delapan area perubahan yaitu mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan dan pelayanan publik. Selanjutnya koordinasi, monitoring dan evaluasi capaian Reformasi Birokrasi;
4. pemulihan pasca bencana pandemi dan wabah penyakit Covid-19 yang menuntut sinergi antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah, antisipasi eskalasi peyebaran dan meningkatkan kesiapsiagaan, kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan menangkal COVID-19 .

Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Ikhtisar Eksekutif	3
Daftar Isi	6
BAB I Pendahuluan	9
1.1. <i>Cascading Kinerja</i> dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	9
1.2. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan	11
1.3. Isu-Isu Strategis	12
1.4. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	13
1.5. Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2023	17
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	18
2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	19
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan	20
2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024	20
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	24
2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	27
BAB III Akuntabilitas Kinerja	29
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024	29
3.2. Capaian Kinerja Lainnya	51
3.3. Efisiensi Anggaran	53
3.4. Inovasi	54
3.5. Lintas Sektor	56
BAB IV Penutup	63
4.1. Kesimpulan	63
4.2. Langkah Perbaikan Kinerja	64
LAMP I R A N	66

Daftar Tabel

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	14
Tabel I.2 Sarana-Prasarana.....	14
Tabel I.3 Anggaran Tahun 2024	16
Tabel I.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	17
Tabel II.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Penghubung Daerah DIY, 2022-2027	19
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	20
Tabel II.3 Tabel Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang berkontribusi terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2024	21
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Tujuan Kepala Badan Penghubung Daerah DIY Tahun 2024....	24
Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Sasaran Kepala Badan Penghubung Daerah DIY Tahun 2024 .	25
Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Tujuan Kepala Badan Penghubung Daerah DIY Tahun 2024	26
Tabel II.7 Perjanjian Kinerja Perubahan Sasaran Kepala Badan Penghubung Daerah Tahun 2024	27
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	29
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2024	29
Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	31
Tabel III.4 Target dan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2024	31
Tabel III.5 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	32
Tabel III.6 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	33
Tabel III.7 Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan terhadap Sasaran 1 ...	34
Tabel III.8 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	39
Tabel III.9 Skema dan bobot nilai Evaluasi Reformasi Perangkat Daerah.....	40
Tabel III.10 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tahun 2024	41
Tabel III.11 Kategori Hasil Evaluasi RB Tahun 2024 berdasar PERMENPAN RB Nomor 9 Tahun 2024 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.....	43
Tabel III.12 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	44
Tabel III.13 Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 2	45
Tabel III.14 Kontribusi Tujuan dan Sasaran Badan Penghubung Daerah DIY terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Daerah	51
Tabel III.15 Kontribusi Program Badan Penghubung Daerah DIY terhadap Capaian Program Pemerintah Daerah	52
Tabel III.16 Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran Belanja dan Efisiensi Anggaran Tahun 2024	53
Tabel III.17 Inventarisasi Lintas Sektor Badan Penghubung Daerah DIY.....	57

Daftar Gambar

Gambar I.1 Cascading Kinerja.....	10
Gambar I.2 Struktur Organisasi.....	11
Gambar I.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Badan Penghubung Daerah DIY.....	11
Gambar II.1 Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP	28
Gambar II.2 ESR MENPAN	28
Gambar III.1 Pesona Budaya Nusantara Yogyakarta 2024	36
Gambar III.2 Pesona Budaya Nusantara Yogyakarta 2024	37
Gambar III.3 Silaturahmi dan Audiensi Pejabat DIY dengan Diaspora Yogyakarta	38
Gambar III.4 Silaturahmi dan Audiensi Pejabat DIY dengan Diaspora Yogyakarta	38
Gambar III.5 Foto Forum BABE.....	50

BAB I Pendahuluan

Bab I berisi:

1. *Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi*
2. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
3. *Isu-Isu Strategis*
4. *Dukungan SDM,*
5. *Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2023*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

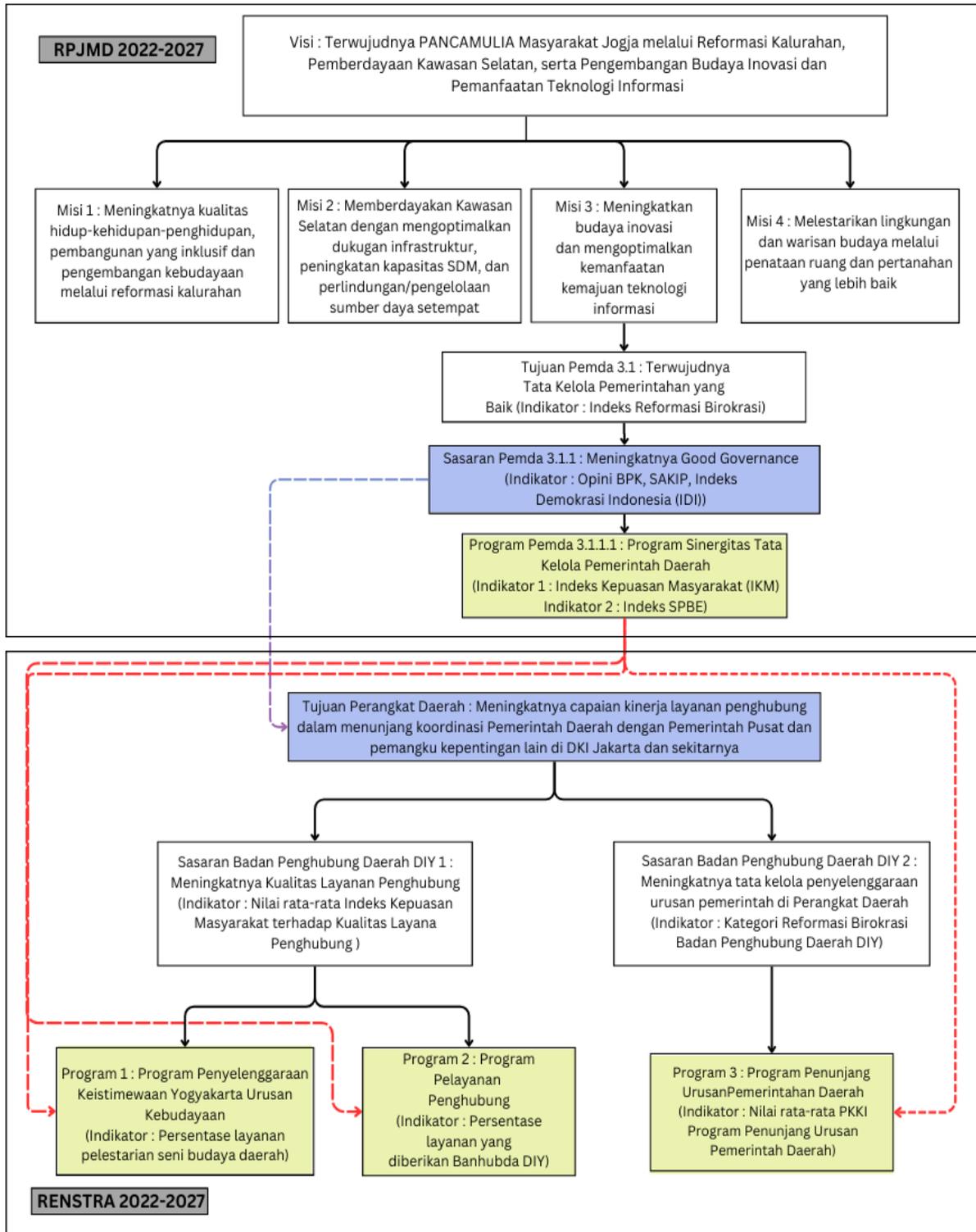
Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1. *Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah*

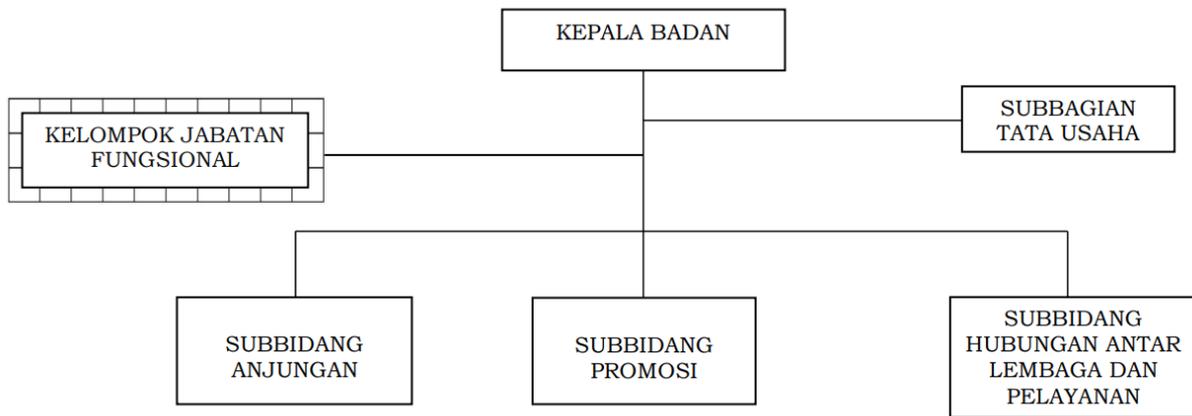
Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2027. Badan Penghubung Daerah DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar I.1 Cascading Kinerja



Sumber: RPJMD 2022-2027, Renstra Banhubda DIY 2022-2027

Gambar I.2 Struktur Organisasi



Sumber: Lampiran PERGUB DIY Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penghubung Daerah

1.2. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD DIY 2022-2027, Badan Penghubung Daerah DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar I.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Badan Penghubung Daerah DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penghubung Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Badan Penghubung Daerah DIY mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Badan;
- b. penyelenggaraan informasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. pemberian pelayanan penunjang terhadap kegiatan perangkat daerah di Jakarta;
- d. pengelolaan anjungan DIY di Taman Mini Indonesia Indah;
- e. penyelenggaraan dan fasilitasi promosi potensi dan seni budaya DIY oleh perangkat daerah di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten;
- f. penyelenggaraan hubungan antar lembaga;
- g. penyelenggaraan keprotokolan;
- h. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan;
- i. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi diaspora DIY se-Indonesia;
- j. pembinaan reformasi birokrasi Badan;
- k. penyusunan kebijakan proses bisnis Badan;
- l. penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkup Badan;
- m. pengevaluasian dan penyusunan laporan pelaksanaan program Badan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Badan

Sesuai Pelaksanaan tugas fungsi Badan Penghubung Daerah DIY dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 141 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan komposisi sebagai berikut:

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana
1) Kepala Badan;	1. Dibawah Kasubbag Tata Usaha:
2) Kepala Subbagaian Tata Usaha;	1) Pengadministrasi Persuratan
3) Kepala Subbidang Anjungan;	2) Penata Kearsipan
4) Kepala Subbidang Promosi;	3) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
5) Kepala Subbidang Hubungan Antar Lembaga dan Pelayanan; dan	4) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
6) Kelompok Jabatan Fungsional.	5) Teknisi Sarana dan Prasarana
	6) Kustodian Barang Milik Negara
	7) Bendahara
	8) Pengadministrasi Keuangan
	9) Pengelola Gaji
	10) Pengelola Akuntansi
	11) Verifikator Data Laporan Keuangan
	12) Pengemudi
	2. Dibawah Kasubbid Anjungan :
	1) Pengelola Objek Wisata
	2) Analisis Kesenian dan Budaya Daerah
	3. Dibawah Kasubbid Promosi :
	1) Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi
	4. Dibawah Kasubbid Hubungan Lembaga dan Pelayanan:
	1) Petugas Protokol
	2) Analis Hubungan Antar Lembaga
	3) Pengelola Layanan Operasional

1.3. Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Badan Penghubung Daerah DIY sebagai bagian dari perangkat daerah yang memiliki tujuan "meningkatkan capaian kinerja layanan penghubung dalam menunjang koordinasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan lain di DKI Jakarta dan sekitarnya", antara lain sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas layanan penghubung termasuk didalamnya penguatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan penghubung. Akses informasi yang belum maksimal terkait fasilitas pelayanan yang diberikan Banhubda, akan menjadi lebih optimal saat ada penunjang dari sisi teknologi, sehingga memudahkan pemantauan fasilitas pelayanan yang tersedia,

kondisi terkini, hingga memfasilitasi feed back kepuasan layanan secara digital. Upaya ini juga akan menghadirkan transparansi informasi publik yang lebih luas kepada masyarakat. Kondisi tersebut bisa terwujud jika didukung juga oleh SDM yang memadai dan aset/sarana yang baik dan menunjang.

- b. Peningkatan kualitas promosi yang dapat lebih memfasilitasi dan menjembatani potensi seni budaya dan industri kreatif yang ada di DIY. Akan tetapi kondisi ini perlu adanya dukungan atau peningkatan SDM dan sarana penunjang, sehingga kualitas promosi yang diberikan menjadi lebih optimal.
- c. Peningkatan pelestarian seni budaya Yogyakarta di Jakarta menuju Banhubda sebagai pusat seni dan budaya gaya Yogyakarta di Ibu kota Negara.
- d. Posisi strategis yang berada di Ibu Kota, dilihat dari sisi tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Daerah DIY masih memiliki peluang besar yang masih bisa dikembangkan yaitu meluaskan fasilitasi dan koordinasi dengan diaspora se-Indonesia.
- e. Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah berbunyi “Untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dapat membentuk badan penghubung Daerah provinsi di ibu kota negara”. Pada tanggal 15 Februari 2022 telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Oleh karena itu diperlukan persiapan menyikapi adanya 2 (dua) aturan tersebut.

1.4. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi						Pegawai yang ada						Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi					Jml	Kualifikasi					Laki	Per
1	2	3	4					5	6					7	8
			S2	S1	D3	SMA	SMP / SD	S2	S2	S1	D3	SMA	SMP / SD		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi														
B.	Jabatan Administrasi														
	1. Administrator	1		1				1		1					1
	2. Pengawas	4		4				4	2	2					4
	3. Pelaksana	37		9	24	3	1	14		3	6	3	2	10	4
C.	Jabatan Fungsional														
	Jumlah	42		14	24	3	1	19	2	6	6	3	2	10	9

Sumber: Data Kepegawaian Badan Penghubung Daerah DIY Desember 2024

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Badan Penghubung Daerah DIY didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 6 orang (30%) dan D3 juga sebanyak 6 orang (30%) , disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 2 orang (15%) dan SMA 3 orang (15%), diikuti jenjang SMP 2 orang (5%). Komposisi pegawai perempuan lebih sedikit dibanding pegawai laki-laki; namun untuk seluruh jabatan struktural dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 23 orang pada jabatan administrasi pelaksana, Dimana untuk saat ini kekurangan pegawai beberapa diisi oleh tenaga PPPK DIY. Terdapat 1 orang pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi jabatan pada jabatan pelaksana. Terdapat satu unit kerja eselon IV yakni Subbidang Promosi yang hanya didukung 1 (satu) orang Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi. Hal ini tentu berpengaruh pada optimalisasi tugas dan fungsi Badan Penghubung Daerah DIY sebagai hub Yang Efektif Bagi Hadirnya Sinergi Pemerintah Daerah DIY Dengan Stakeholder Terkait di Jakarta dan Sekitarnya.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
	ASET TETAP	4.058	34.181.448.371,00
1	Tanah Tanah	2 2	12.984.000.000,00 12.984.000.000,00
1	Peralatan dan Mesin Alat Besar	1.450 5	7.848.044.923,00 67.145.000,00

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
2	Alat-alat Angkutan	15	4.889.347.332,00
3	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1.283	2.275.165.791,00
4	Alat-alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	84	354.350.000,00
5	Alat Kedokteran dan Kesehatan	7	15.300.000,00
6	Komputer	52	237.936.800,00
7	Alat Keselamatan Kerja	1	550.000,00
8	Peralatan Olah Raga	3	8.250.000,00
	Gedung dan Bangunan	18	12.157.899.798,00
1	Bangunan Gedung	16	11.942.840.798,00
2	Monumen	1	196.519.000,00
3	Tugu Titik Kontrol/Pasti	1	18.540.000,00
	Jalan, Jaringan dan Irigasi	6	80.600.000,00
1	Instalasi	1	17.400.000,00
2	Jaringan	5	63.200.000,00
	Aset Tetap Lainnya	2.582	1.110.903.650,00
1	Bahan Perpustakaan	56	40.128.400,00
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	2.526	1.070.775.250,00
	ASET LAINNYA	173	271.142.134,00
1	Aset Lain-Lain Aset Lain-Lain	173 173	271.142.134,00 271.142.134,00
	Jumlah	4.231	34.452.590.505,00

Sumber: Data Neraca Banhubda 31 Desember 2024 (Unaudited)

Kendaraan dinas terdiri dari 10 (sepuluh) unit kendaraan operasional, 2 (dua) unit kendaraan roda dua, dan 2 (dua) unit kendaraan listrik. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Hanya untuk ruang kerja pegawai, sehubungan dengan adanya pandemic dan tuntutan jaga jarak, perlu dipersiapkan ruangan yang lebih sesuai ketentuan. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal computer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1:1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Tabel I.3 Anggaran Tahun 2024

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
4			PENDAPATAN DAERAH			
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp 588.055.000	Rp 574.800.000	(Rp 13.255.000)
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp 588.055.000	Rp 574.800.000	(Rp 13.255.000)
			Jumlah Pendapatan	Rp 588.055.000	Rp 574.800.000	(Rp 13.255.000)
5			BELANJA DAERAH			
5	1		BELANJA OPERASI	Rp 11.852.210.031	Rp 11.840.953.013	(Rp 11.275.018)
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp 6.052.557.639	Rp 6.098.547.065	Rp 45.989.426
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 5.799.652.392	Rp 5.742.387.948	(Rp 57.264.444)
5	1	05	Belanja Hibah	Rp 0	Rp 0	Rp 0
5	2		BELANJA MODAL	Rp 33.000.000	Rp 81.700.000	Rp 48.700.000
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 0	Rp 48.700.000	Rp 48.700.000
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 0	Rp 0	Rp 0
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 33.000.000	Rp 33.000.000	Rp 0
			Jumlah Belanja	Rp 11.885.210.031	Rp 11.922.635.013	Rp 37.424.982
			Total Surplus/(Defisit)	(Rp 11.297.155.031)	(Rp 11.347.835.013)	(Rp 50.679.982)
6			PEMBIAYAAN DAERAH	Rp 0	Rp 0	Rp 0
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp 0	Rp 0	Rp 0
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0	Rp 0	Rp 0
			Pembiayaan Neto	Rp 0	Rp 0	Rp 0

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan Penghubung Daerah DIY Tahun 2024 tanggal 25 November 2024

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penghubung Daerah DIY berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dana Keistimewaan. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2024 Anggaran Badan Penghubung Daerah DIY semula Rp 11.885.210.031,00 dan mengalami perubahan menjadi Rp 11.922.635.013,00 atau bertambah Rp 37.424.982,00. Perubahan anggaran Tahun 2024 merupakan bukti dukungan komitmen Banhubda bagi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Pengadaan Mushola diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat yang membutuhkan di Anjungan DIY TMII. Pengadaan Kendaraan Listrik juga sesuai dengan kebijakan TMII untuk menciptakan green environment and zero emission di Lingkungan TMII. Kendaraan listrik ini mendukung mobilitas pegawai dan pemangku kepentingan terkait dalam menjalankan aktivitasnya di TMII.

1.5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Tabel I.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Meningkatkan kualitas evaluasi AKIP, diantaranya dengan meningkatkan kualitas LKjIP dan pendampingan tugas SDM pelaksana Evaluasi AKIP.	1. Melakukan pendampingan tugas SDM pelaksana Evaluasi AKIP dan mengirim petugas pelaksana Evaluasi AKIP pada pelatihan penyusunan AKIP.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab II berisi:

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

Tahun 2024 merupakan tahun pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 -2027 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027.

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2024 diwarnai agenda perubahan baik melalui mekanisme perubahan dana keistimewaan maupun perubahan APBD. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Pada dasarnya perubahan anggaran tidak mengubah target kinerja pada level tujuan Perangkat Daerah, sasaran strategis Perangkat Daerah dan program Perangkat daerah, namun mengubah pada tataran target kinerja output dalam sub kegiatan. Perubahan anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Badan Penghubung Daerah DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2022-2027.

Renstra Badan Penghubung Daerah DIY yang merupakan penjabaran operasional RPJMD DIY Tahun 2022-2027 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu tahun 2024. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2027.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Badan Penghubung Daerah DIY mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah “Meningkatnya Good Governance”. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Badan Penghubung Daerah DIY selama lima tahun adalah:

“Meningkatnya Capaian Kinerja Layanan Penghubung dalam Menunjang Koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemangku Kepentingan Lain di DKI Jakarta dan Sekitarnya”

Adapun tujuan dan sasaran Badan Penghubung Daerah DIY dalam waktu lima tahun dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel II.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Penghubung Daerah DIY, 2022-2027

N O.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi Awal (Base line 2022)	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.	Meningkatnya Capaian Kinerja Layanan penghubung dalam menunjang koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan lain di DKI Jakarta dan sekitarnya	Persentase Layanan penghubung yang berkualitas dalam menunjang koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan lain	%	n/a	87	87,5	88	88,5	89	89
1.	Meningkatnya kualitas layanan penghubung	Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Layanan Penghubung	Angka Indeks	n/a	87	87,5	88	88,5	89	89
2.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Badan Penghubung Daerah DIY	Kategori	A (85,55)	A (86,55)	A (87,55)	A (88,5)	A (89,55)	A (90,55)	A (90,55)

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
Meningkatnya capaian kinerja layanan penghubung dalam menunjang koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan lain di DKI Jakarta dan sekitarnya	1. Meningkatnya kualitas layanan Penghubung	Program pelayanan penghubung	Pelaksanaan pelayanan penghubung	
		Program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	Sarana prasarana keistimewaan urusan kebudayaan	
			Pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya	
	2. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah di Perangkat Daerah	Program penunjang urusan pemerintah daerah		Adat seni tradisi dan lembaga budaya
				Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
				Administrasi keuangan perangkat daerah
				Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
				Administrasi umum perangkat daerah
				Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
				Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran Badan Penghubung Daerah DIY tahun 2024 dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3 Tabel Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang berkontribusi terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	
Meningkatnya Capaian Kinerja Layanan penghubung dalam menunjang koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan lain di DKI Jakarta dan sekitarnya	1. Meningkatkan kualitas layanan Penghubung	1.1. PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	185.308.600	190.213.600	4.905.000	
		1.1.1. Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	185.308.600	190.213.600	4.905.000	
		1.1.1.1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	113.985.600	112.495.600	(1.490.000)	
		1.1.1.2. Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	71.323.000	77.718.000	6.395.000	
		1.2. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	4.132.628.800	4.124.018.800	(8.610.000)	
		1.2.1. Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	239.600.000	239.600.000	0	
		1.2.1.1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	239.600.000	239.600.000	0	
		1.2.2. Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	800.000.000	797.340.000	(2.660.000)	
		1.2.2.1. Pengembangan Industri Kreatif	800.000.000	797.340.000	(2.660.000)	
		1.2.3. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	3.093.028.800	3.087.078.800	(5.950.000)	
	1.2.3.1. Gelar Seni Budaya Daerah	3.093.028.800	3.087.078.800	(5.950.000)		
			Total Nilai Anggaran yang mendukung Sasaran 1	4.317.937.400	4.314.232.400	(3.705.000)
		2. Meningkatkan Tata kelola	2.1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.567.272.631	7.608.402.613	41.129.982

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Perangkat Daerah	2.1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.863.000	6.863.000	0
		2.1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.888.000	1.888.000	0
		2.1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.160.000	1.160.000	0
		2.1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.510.000	1.510.000	0
		2.1.1.4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.305.000	2.305.000	0
		2.1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.048.049.639	6.094.199.065	46.149.426
		2.1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.006.417.639	6.052.407.065	45.989.426
		2.1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39.572.000	39.732.000	160.000
		2.1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	740.000	740.000	0
		2.1.2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1.320.000	1.320.000	0
		2.1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.631.000	6.761.000	130.000
		2.1.3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.631.000	6.761.000	130.000
		2.1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	83.743.000	131.362.600	47.619.600

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		2.1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.355.500	13.055.500	7.700.00
		2.1.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.912.500	35.912.500	0
		2.1.4.3. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	13.565.000	13.110.000	(455.000)
		2.1.4.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.640.000	2.205.600	(434.400)
		2.1.4.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.270.000	67.079.000	40.809.000
		2.1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	48.700.000	48.700.000
		2.1.5.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	48.700.000	48.700.000
		2.1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.143.195.992	1.050.527.948	(92.668.044)
		2.1.6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.685.000	9.300.000	(2.385.000)
		2.1.6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	272.495.900	239.900.000	(32.595.900)
		2.1.6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	859.015.092	801.327.948	(57.687.144)
		2.1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	278.790.000	269.989.000	(8.801.000)

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		2.1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	274.790.000	265.989.000	(8.801.000)
		2.1.7.2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.000.000	4.000.000	0
		Total Nilai Anggaran yang mendukung Sasaran 2	7.567.272.631	7.608.402.613	41.129.982
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran			11.885.210.031	11.922.635.013	37.424.982

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Banhubda DIYi Tahun 2024

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Badan Penghubung Daerah DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Tujuan Kepala Badan Penghubung Daerah DIY Tahun 2024

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya capaian kinerja layanan penghubung dalam menunjang koordinasi	Persentase layanan penghubung yang berkualitas dalam menunjang	%	87,5	Triwulan I	87,5
					Triwulan II	87,5
					Triwulan III	87,5

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
	Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan lain di DKI Jakarta dan sekitarnya	koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan lain			Triwulan IV	87,5*)

Keterangan:

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Sasaran Kepala Badan Penghubung Daerah DIY Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Penghubung	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Layanan Penghubung	Angka Indeks	87,5	Triwulan I	87,5	
					Triwulan II	87,5	
					Triwulan III	87,5	
					Triwulan IV	87,5*)	
2.	Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Perangkat Daerah	RB	Indeks	A	Triwulan I	A
						Triwulan II	A
						Triwulan III	A
						Triwulan IV	A *)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program Perangkat Daerah	Anggaran
1.	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG (APBD)	Rp 185.308.600,00
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN (DAIS)	Rp 4.132.628.800,00
3.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (APBD)	Rp 7.567.272.631,00
	Jumlah Anggaran	Rp 11.885.210.031,00

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Pada tahun 2024, Badan Penghubung Daerah DIY melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Reviu dilakukan karena adanya perubahan anggaran kegiatan dan telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Tujuan Kepala Badan Penghubung Daerah DIY Tahun 2024

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya capaian kinerja layanan penghubung dalam menunjang koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan lain di DKI Jakarta dan sekitarnya	Persentase layanan penghubung yang berkualitas dalam menunjang koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan lain	%	87,5	Triwulan I	87,5
					Triwulan II	87,5
					Triwulan III	87,5
					Triwulan IV	87,5*)

Keterangan:

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

Tabel II.7 Perjanjian Kinerja Perubahan Sasaran Kepala Badan Penghubung Daerah Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Penghubung	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Layanan Penghubung	%	87,5	Triwulan I	87,5
					Triwulan II	87,5
					Triwulan III	87,5
					Triwulan IV	87,5*)
2.	Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kategori	A (87,55)	Triwulan I	A (87,55)
					Triwulan II	A (87,55)
					Triwulan III	A (87,55)
					Triwulan IV	A (87,55)*)

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program Perangkat Daerah	Anggaran
1.	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG (APBD)	Rp 190.213.600,00
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN (DAIS)	Rp 4.124.018.800,00
3.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (APBD)	Rp 7.608.402.613,00
	Jumlah Anggaran	Rp 11.922.635.013,00

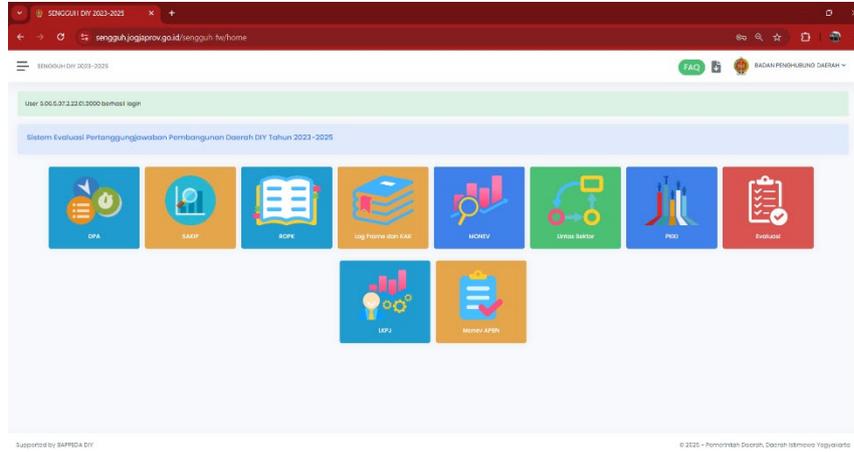
2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV

2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi sungguh.jogjaprovo.go.id

yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.

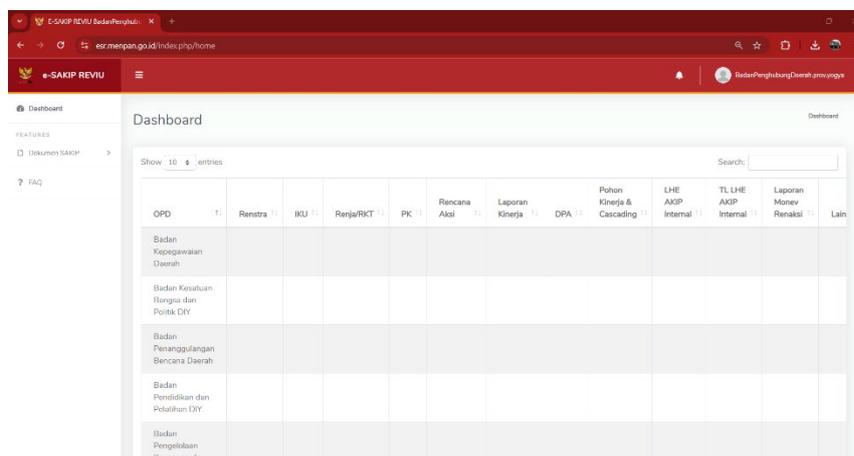
Gambar II.1 Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP



Sumber: <http://sungguh.jogjaprov.go.id/>

2. Instrumen dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia yang diharapkan digunakan untuk perangkat daerah dan sub bagian program agar saling bekerja sama dan berkonsultasi kepada Kemenpan RB melalui aplikasi esr.menpan.go.id. Aplikasi esr.menpan.go.id ini nantinya digunakan untuk melihat dokumen SAKIP dan RB yang disampaikan oleh perangkat daerah.

Gambar II.2 ESR MENPAN



Sumber: <https://esr.menpan.go.id/>

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab III berisi :

1. Capaian Kinerja Tahun 2024
2. Capaian Kinerja Lainnya
3. Efisiensi Anggaran
4. Inovasi
5. Lintas Sektor

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024

Badan Penghubung Daerah DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Badan Penghubung Daerah DIY dengan Bapak Gubernur DIY tahun 2024. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ Sumber: *Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2024

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATU AN	BA SE LI NE 20 22	REAL ISASI 2023	TAHUN 2024				TARGE T AKHIR RPJMD/ RENST RA
						TAR GET	REALI SASI	PERS EN TASE	KRITE RIA/ KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	Meningkatnya capaian kinerja layanan penghubung dalam menunjang koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan lain	<u>Indikator:</u> Persentase layanan penghubung yang berkualitas dalam menunjang koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan lain <u>Meta Indikator:</u> Jumlah penerima layanan yang ingin kembali mendapatkan fasilitas Banhubda	%	n/a	100 (10/10 x 100%)	87,5	92,68 (1.773 /1.913 x 100%)	105,92 (92,68 /87,5 x 100%)	Sangat baik	89%

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATU AN	BA SE LI NE 20 22	REAL ISASI 2023	TAHUN 2024				TARGE T AKHIR RPJMD/ RENST RA
						TAR GET	REALI SASI	PERS EN TASE	KRITE RIA/ KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	sekitarnya	DIY dibagi seluruh penerima layanan dikali 100%								
1	Meningkatnya kualitas layanan penghubung	<u>Indikator:</u> Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Layanan Penghubung <u>Meta Indikator:</u> Jumlah seluruh IKM Layanan yang diberikan dibagi jumlah jenis layanan yang diberikan	Angka Indeks	n/a	92,29	87,5	92,83 (928,3 /10)	106,0 9% (92,83 /87,5x 100%)	Sangat Baik	89 Angka Indeks
2	Meningkatnya Tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Perangkat Daerah	<u>Indikator:</u> Kategori Reformasi Birokrasi Badan Penghubung Daerah DIY <u>Meta Indikator:</u> Kategori nilai indeks Reformasi Birokrasi Badan Penghubung Daerah DIY Nilai Kategori Reformasi Birokrasi; AA=1 (Skor>100); A=2 (>80 s.d 100); BB=3 (>70-80); B=4 (>60-70); CC=5 (>50-60); C=6 (>30-50)	kategori	A	A	A (2)	A (2)	100% (2/2x 100%)	Sangat Baik	A (2)

Adapun analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

1.1.1. Tujuan Perangkat Daerah

Kinerja Tujuan Meningkatnya capaian kinerja layanan penghubung dalam menunjang koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan lain di DKI Jakarta dan sekitarnya diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut:

Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Tujuan	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya capaian kinerja layanan penghubung dalam menunjang koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan lain di DKI Jakarta dan sekitarnya	Persentase layanan penghubung yang berkualitas dalam menunjang koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan lain	Jumlah penerima layanan yang ingin kembali mendapatkan fasilitas Banhubda DIY dibagi seluruh penerima layanan dikali 100%

Sumber Data diolah dari jumlah responden atau penerima layanan yang ingin dilayani kembali dalam mendapatkan fasilitas Banhubda DIY dibagi total seluruh responden atau penerima layanan dikali 100% sehingga diperoleh besaran persentase layanan penghubung yang berkualitas dalam menunjang koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan lain.

Kinerja Tujuan Meningkatkan capaian kinerja layanan penghubung dalam menunjang koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan lain di DKI Jakarta dan sekitarnya pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.4 Target dan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2024

No	Indikator Tujuan	Realisasi 2023	2024			Target Akhir Renstra (2027)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2027(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Persentase layanan penghubung yang berkualitas dalam menunjang koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan lain <u>Meta Indikator :</u>	100 (10/10 x 100%)	87,5	92,68 (1.773/1.913 x 100%)	105,92 (92,68/87,5 x 100%)	89	104,13 (92,68/89 x 100%)

	Jumlah penerima layanan yang ingin kembali mendapatkan fasilitas Banhubda DIY dibagi seluruh penerima layanan dikali 100%						
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Analisis Ketercapaian Tujuan : Meningkatnya capaian kinerja layanan penghubung dalam menunjang koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan lain di DKI Jakarta dan sekitarnya adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 92,68%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 105,92% (terlampau).
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 100%, terdapat penurunan sebesar 7,32%.
- c. Capaian target indikator pada tahun 2024 terhadap target tahun 2027 adalah 104,13%.

Capaian indikator tujuan tersebut didukung oleh kinerja 2 (dua) Sasaran Strategis, yakni Meningkatnya Kualitas Layanan Penghubung dan Meningkatnya Tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Perangkat Daerah.

1.1.2. Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Layanan Penghubung

Kinerja sasaran **Meningkatnya Kualitas Layanan Penghubung** diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut:

Tabel III.5 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Penghubung	Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Layanan Penghubung	Jumlah Seluruh IKM Layanan yang diberikan dibagi jumlah jenis layanan yang diberikan

Kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Penghubung tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.6 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024			Target Akhir Renstra (2027)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2027(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Layanan Penghubung <u>Meta Indikator :</u> Jumlah seluruh IKM layanan yang diberikan dibagi jumlah jenis layanan yang diberikan	92,29 (922,87/10)	87,5	92,83 (928,3/10 x 100%)	106,09% (92,83/87,5 x 100%)	89	104,3% (92,83/89 x 100%)

Analisis Ketercapaian Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Layanan Penghubung adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 92,83 angka indeks, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 106,09% (terlampau).
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 92,29, terdapat kenaikan sebesar 0,54.
- c. Capaian target indikator pada tahun 2024 terhadap target tahun 2027 adalah 104,3%.

Keberhasilan capaian Sasaran 1, dengan Indikator Jumlah seluruh IKM layanan yang diberikan dibagi jumlah jenis layanan yang diberikan tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel III.7 Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan terhadap Sasaran 1

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan		Persentase layanan pelestarian seni budaya daerah	100%	100%	100%
	1.1. Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	100%	100%	100%
	1.1.1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	12 unit	12 unit	100%
	1.2. Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Terlaksananya Dukungan Pengembangan Industri Kreatif	100%	100%	100%
	1.2.1. Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	1 unit	1 unit	100%
	1.3. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terlaksananya dukungan penyelenggaraan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100%	100%	100%
	1.3.1. Gelar Seni Budaya Daerah	Jumlah Laporan Gelar Seni Budaya Daerah	33 laporan	33 laporan	100%
2. Program Pelayanan Penghubung		Persentase layanan yang diberikan Banhudba DIY	100%	100%	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	1.1. Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat, dan fasilitasi pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya	100%	100%	100%
	1.1.1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	5 laporan	5 laporan	100%
	1.1.2. Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	2 laporan	2 laporan	100%

Capaian tersebut didukung dari:

- a. **Capaian Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan** sebesar 100% dari 3 kegiatan yaitu Kegiatan Gelar Seni Budaya Daerah, Kegiatan Pengembangan Industri Kreatif, dan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya.

Pada tanggal 23 November 2024 di Anjungan DIY TMII melaksanakan Pagelaran Pesona Budaya Nusantara bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam rangka sebagai wujud pelestarian budaya dan ajang promosi daerah Kabupaten Gunungkidul dengan menampilkan Konser Karawitan “Gunungkidulan”, Beksan Sekar Pudyastuti, dan Wayang Wong Kolaborasi “Semar Bangun Kahyangan”.

Pesona Budaya Nusantara merupakan pagelaran seni dan budaya yang diadakan setiap satu tahun sekali dan dilaksanakan secara bergilir oleh kabupaten/kota se-DIY. Tahun 2023 ini, Pesona Budaya Nusantara diselenggarakan

hasil kerja sama Badan penghubung Daerah DIY dan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Pesona Budaya Tahun ini dihadiri oleh Duta Besar Negara Sahabat, Pejabat Negara Republik Indonesia maupun Pejabat Daerah, Direktur Utama Taman Mini Indonesia, Trah Hamengku Buwono di Jakarta, Trah Pakualaman Hudyana di Jakarta, Diaspora DIY di Jakarta dan Komunitas Warga Jepang di Jakarta.

Manfaat dari dilaksanakannya Pesona Budaya Nusantara ini adalah memberikan wadah dan apresiasi kepada seniman Yogyakarta untuk dapat pentas di Wilayah Jabodetabek, meningkatkan promosi potensi daerah ke masyarakat dan media sebagai pemupuk, untuk menumbuhkembangkan, mengenalkan dan melestarikan nilai-nilai budaya daerah yang adiluhung, menarik minat wisatawan berkunjung ke Yogyakarta, dan mempromosikan Daerah Istimewa Yogyakarta baik secara nasional maupun Internasional di Jakarta dan sekitarnya.

Gambar III.1 Pesona Budaya Nusantara Yogyakarta 2024



Gambar III.2 Pesona Budaya Nusantara Yogyakarta 2024



- b. **Capaian Program Pelayanan Penghubung** sebesar 100% dari 2 kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat dan Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penghubung Daerah, Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diantaranya memiliki fungsi penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi diaspora DIY se – Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka diselenggarakan kegiatan Silaturahmi Pejabat DIY Dengan Diaspora Masyarakat DIY”. Dalam hal ini, yang disebut “Diaspora Yogyakarta” adalah mereka yang mempunyai “keterikatan” dengan Yogyakarta baik secara yuridis maupun sosiologis. Salah satu kegiatan pada Badan Penghubung Daerah DIY Sub Bidang Hubungan Lembaga dan Pelayanan untuk mendukung tercapainya visi misi tersebut adalah menyelenggarakan Silaturahmi dan Audiensi Pejabat DIY dengan Diaspora Masyarakat DIY yang diselenggarakan di Anjungan DIY TMII - Jakarta.

Pada tanggal 13 Desember 2024 di Anjungan Daerah Istimewa Yogyakarta, TMII melaksanakan Silaturahmi dan Audiensi Pejabat DIY dengan Diaspora Masyarakat DIY di Jakarta. Kegiatan Silaturahmi Dan Audiensi Pejabat DIY Dengan Diaspora Masyarakat DIY diikuti oleh 150 peserta yang terdiri dari jajaran pimpinan DPRD DIY dan 11 paguyuban masyarakat DIY di Jakarta yang tergabung dalam FOKOMDIA.

Dalam penyelenggaraan Silaturahmi Dan Audiensi Pejabat DIY dengan Diaspora Masyarakat DIY, Badan Penghubung Daerah DIY memberikan ruang terbuka

bagi paguyuban masyarakat DIY di Jakarta yang tergabung dalam FOKOMDIA (Forum Komunikasi Masyarakat Diaspora Yogyakarta Istimewa) untuk berdiskusi dengan jajaran pimpinan dan anggota DPRD DIY periode 2024-2029.

Kegiatan Silaturahmi dan Audiensi Pejabat DIY dengan Diaspora Masyarakat DIY Tahun 2024 ini memiliki maksud dan tujuan yaitu terlaksananya Silaturahmi dan Audiensi Pejabat DIY dengan Diaspora Masyarakat DIY sebagai upaya fasilitasi pelayanan pimpinan serta menjembatani koordinasi antara Pemerintah Daerah DIY dengan Diaspora masyarakat DIY yang berada di Jakarta, mempererat hubungan jejaring antara Pemerintah Daerah DIY dengan diaspora masyarakat DIY yang tergabung dalam FOKOMDIA serta sesama anggota FOKOMDIA, dan Fasilitasi kerja sama dengan diaspora masyarakat Yogyakarta di Jabodetabek.

Gambar III.3 Silaturahmi dan Audiensi Pejabat DIY dengan Diaspora Yogyakarta



Gambar III.4 Silaturahmi dan Audiensi Pejabat DIY dengan Diaspora Yogyakarta



Faktor Pendukung keberhasilan

- a. Kerja sama yang baik dengan pihak Dinas Kebudayaan se-Pemda DIY, TMII, Anjungan Jawa Tengah, Paguyuban Yogyakarta di Jakarta dan Pelaku Seni.
- b. Tersedianya fasilitas layanan kendaraan, layanan penginapan, layanan penggunaan pendopo Anjungan DIY di TMII, layanan protokol pimpinan, layanan pawai budaya, layanan silaturahmi dengan pimpinan daerah, layanan pameran promosi potensi yang baik.

Faktor Penghambat keberhasilan

- a. Keterbatasan kendaraan operasional roda 4 yang lebih sedikit dari permintaan Pelayanan Pimpinan.
- b. Cuaca yang kurang kondusif pada saat pelaksanaan kegiatan.
- c. Pelaksanaan di Anjungan mengalami kesulitan Akses Masuk yang sekarang ini Taman Mini Indonesia Indah menerapkan Green Zone.

1.1.3. Sasaran 2 : Meningkatnya Tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah

Kinerja sasaran Meningkatnya tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah diukur dengan Indikator dan meta indikator sebagai berikut:

Tabel III.8 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

N O	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Badan Penghubung Daerah DIY	Kategori nilai indeks Reformasi Birokrasi Badan Penghubung Daerah DIY Nilai Kategori Reformasi Birokrasi; AA=1 (Skor>100); A=2 (>80 s.d 100); BB=3 (>70-80); B=4 (>60-70); CC=5 (>50-60); C=6 (>30-50)

Sumber data diolah dari Hasil Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada 37 (tiga puluh tujuh) OPD. Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2024, menggunakan indikator yang dirumuskan oleh Perangkat Daerah *leading sector* Reformasi Birokrasi General dan Perangkat Daerah Koordinator Reformasi Birokrasi Tematik yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 436/KEP/2024 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah DIY Tahun 2024. Pelaksanaan Evaluasi RB Indikator

tersebut merupakan indikator yang diturunkan dari Keputusan Menteri PAN dan RB RI Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024.

Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2024 menggunakan skema dan bobot nilai sebagai berikut:

Tabel III.9 Skema dan bobot nilai Evaluasi Reformasi Perangkat Daerah

No	Uraian	Bobot	Keterangan
Reformasi Birokrasi General			
A	Strategi Pelaksanaan RB General	10	1 indikator
B	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	40	
	Sasaran 1 : Tata Kelola pemerintahan Digital yang Efektif Lincah dan Kolaboratif	32	12 indikator
	Sasaran 2 : Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional	8	2 indikator
C	Capaian sasaran Strategis RB	50	
	Sasaran 1 : Tata Kelola pemerintahan Digital yang Efektif Lincah dan Kolaboratif	28	4 indikator
	Sasaran 2 : Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional	22	3 indikator
Total RB General		100	
Reformasi Birokrasi Tematik			
A	Capaian Evaluasi RB Tematik Pengentasan Kemiskinan	5	5 indikator
B	Capaian Evaluasi RB Tematik Pengendalian Inflasi	5	4 indikator
C	Capaian Evaluasi RB Tematik Peningkatan Investasi	5	2 indikator
D	Capaian Evaluasi RB Tematik Penggunaan Produk Dalam Negeri	5	3 indikator
E	Capaian Evaluasi RB Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (<i>Stunting</i>)	5	5 indikator
Total RB Tematik		20	
Total Nilai RB		120	

Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel III.10 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tahun 2024

No	Unit Kerja	Nilai RB General 2024	Nilai RB Tematik 2024	INDEKS RB 2024	Kategori	Predikat	Nilai RB General 2023	Nilai RB Tematik 2023	INDEKS RB 2023	GAP
1	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	86,95	8,92	95,87	A	Memuaskan	83,77	5,81	89,58	6,29
2	Biro Hukum Setda DIY	84,28	5,85	90,13	A	Memuaskan	83,93	5,30	89,23	0,91
3	Biro Organisasi Setda DIY	87,57	9,06	96,63	A	Memuaskan	86,97	5,41	92,38	4,25
4	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY	83,26	5,18	88,44	A	Memuaskan	83,04	4,63	87,67	0,77
5	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY	83,51	10,23	93,74	A	Memuaskan	83,46	8,00	91,46	2,29
6	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY	86,60	6,88	93,48	A	Memuaskan	85,25	6,49	91,74	1,74
7	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	83,78	8,29	92,07	A	Memuaskan	83,67	4,50	88,17	3,90
8	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY	83,31	5,00	88,31	A	Memuaskan	83,39	5,25	88,64	-0,33
9	Paniradya Kaistimewan	84,31	9,68	93,99	A	Memuaskan	86,75	6,43	93,18	0,81
10	Sekretariat DPRD DIY	83,65	5,11	88,76	A	Memuaskan	77,60	4,33	81,93	6,83
11	Inspektorat DIY	89,25	6,99	96,24	A	Memuaskan	86,83	6,30	93,13	3,11
12	Dinas Pariwisata DIY	84,64	8,51	93,15	A	Memuaskan	82,67	5,73	88,40	4,75
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY	86,95	12,05	99,00	A	Memuaskan	85,72	6,87	92,59	6,41
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	84,07	11,40	95,47	A	Memuaskan	83,43	8,07	91,50	3,97
15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	85,45	12,00	97,45	A	Memuaskan	82,60	6,97	89,57	7,88
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY	84,94	7,61	92,55	A	Memuaskan	83,22	5,75	88,97	3,58
17	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	85,22	11,94	97,16	A	Memuaskan	83,95	6,81	90,76	6,40
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	85,47	8,46	93,93	A	Memuaskan	84,74	6,71	91,45	2,48
19	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY	83,49	12,39	95,88	A	Memuaskan	81,34	6,91	88,25	7,63

No	Unit Kerja	Nilai RB General 2024	Nilai RB Tematik 2024	INDEKS RB 2024	Kategori	Predikat	Nilai RB General 2023	Nilai RB Tematik 2023	INDEKS RB 2023	GAP
20	Dinas Perhubungan DIY	82,98	7,19	90,17	A	Memuaskan	83,79	5,25	89,04	1,13
21	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandhala Sarta Tata Sasana) DIY	83,26	7,38	90,64	A	Memuaskan	85,39	4,80	90,19	0,45
22	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	86,94	12,54	99,48	A	Memuaskan	86,71	8,25	94,96	4,52
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY	85,06	7,55	92,61	A	Memuaskan	86,42	6,17	92,59	0,03
24	Dinas Kesehatan DIY	87,83	9,64	97,47	A	Memuaskan	86,10	6,62	92,72	4,75
25	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY	82,52	9,94	92,46	A	Memuaskan	76,32	6,10	82,42	10,04
26	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY	89,36	6,94	96,30	A	Memuaskan	84,42	2,36	86,78	9,51
27	Dinas Sosial DIY	86,52	8,74	95,26	A	Memuaskan	86,13	7,00	93,13	2,13
28	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY	82,61	6,29	88,90	A	Memuaskan	82,35	4,24	86,59	2,32
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY	85,13	9,11	94,24	A	Memuaskan	84,43	5,52	89,95	4,29
30	Satuan Polisi Pamong Praja DIY	80,52	4,55	85,07	A	Memuaskan	81,91	4,00	85,91	-0,84
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY	88,83	10,25	99,08	A	Memuaskan	88,11	7,32	95,43	3,66
32	Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY	87,67	7,22	94,89	A	Memuaskan	88,56	5,85	94,41	0,48
33	Badan Kepegawaian Daerah DIY	89,65	7,04	96,69	A	Memuaskan	90,47	4,10	94,57	2,12
34	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	88,09	8,04	96,13	A	Memuaskan	87,61	4,44	92,05	4,08
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY	85,71	5,65	91,36	A	Memuaskan	83,74	4,97	88,71	2,66
36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY	80,83	6,33	87,16	A	Memuaskan	82,20	3,65	85,85	1,31
37	Badan Penghubung Daerah DIY	84,30	4,13	88,43	A	Memuaskan	79,88	2,53	82,41	6,03
RATA-RATA		85,26	8,22	93,48			84,24	5,66	89,90	3,58

Tabel III.11 Kategori Hasil Evaluasi RB Tahun 2024 berdasar PERMENPAN RB Nomor 9 Tahun 2024 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi

No	Kriteria	Nilai/ Angka	Predikat	Interpretasi
1	AA	> 100	Sangat Memuaskan	Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK
2	A	>80 - 100	Memuaskan	Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
	A-		Memuaskan dengan Catatan	Memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
3	BB	>70 - 80	Sangat Baik	Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
4	B	>60 - 70	Baik	Memenuhi sebagian kecil (<60%) kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
5	CC	>50 - 60	Cukup	Penerapan RB dilaksanakan melalui sebagian kecil percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing
6	C	>30 - 50	Kurang	RB dilaksanakan sebatas formalitas, belum optimal menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing
7	D	0 -30	Sangat Kurang	RB dilaksanakan sebatas inisiatif awal, belum diformalkan dan belum menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK

Kinerja sasaran Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.12 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024			Target Akhir Renstra (2027)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2027(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kategori Reformasi Birokrasi Badan Penghubung Daerah DIY <u>Meta Indikator:</u> Kategori nilai indeks Reformasi Birokrasi Badan Penghubung Daerah DIY Nilai Kategori Reformasi Birokrasi; AA=1 (>100); A=2 (>80 s.d 100); BB=3 (>70-80); B=4 (>60-70); CC=5 (>50-60); C=6 (>30-50)	A (82,41)	A (87,55)	A (88,43)	101% (88,43/87,55 x 100%)	A (90,55)	97,66% (88,43/90,55 x 100%)

Analisis Ketercapaian Sasaran 2 : Meningkatnya tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Perangkat Daerah

- a. Berdasarkan hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2024, Badan Penghubung Daerah DIY mendapatkan nilai skor Indeks RB Perangkat daerah 88,43 dengan Kategori A (Memuaskan);
- b. Target tahun 2024 A (87,55) realisasi A (88,43), dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 101% (terlampau).
- c. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 82,41 (A), terdapat kenaikan sebesar 6,02 atau 6,8%.
- d. Capaian target indikator pada tahun 2024 terhadap target tahun 2027 sebesar 97,66%.

Keberhasilan capaian Sasaran 2, dengan Indikator Kategori RB Perangkat Daerah tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel III.13 Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 2

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	%Capaian
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,7	90,85	100,17
	1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100
	1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	100
	1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	2 dokumen	2 dokumen	100
	1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100
	1.1.4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	%Capaian
	1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100%	100%	100%
	1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 orang/bulan	41 orang/bulan	100
	1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100
	1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan	100
	1.2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100
	1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	100%	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	%Capaian
	1.3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100%
	1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan, Fasilitasi Kunjungan Tamu dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	100	100%
	1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%
	1.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	100%
	1.4.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%
	1.4.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	%Capaian
	1.4.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	2 laporan	100%
	1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Pengadaan Mebeler	100%	100%	100%
	1.5.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	5 unit	100%
	1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100%
	1.6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	100%
	1.6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%
	1.6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	%Capaian
	1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	100%	100%
	1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit	11 unit	100%
	1.7.2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 unit	20 unit	100%

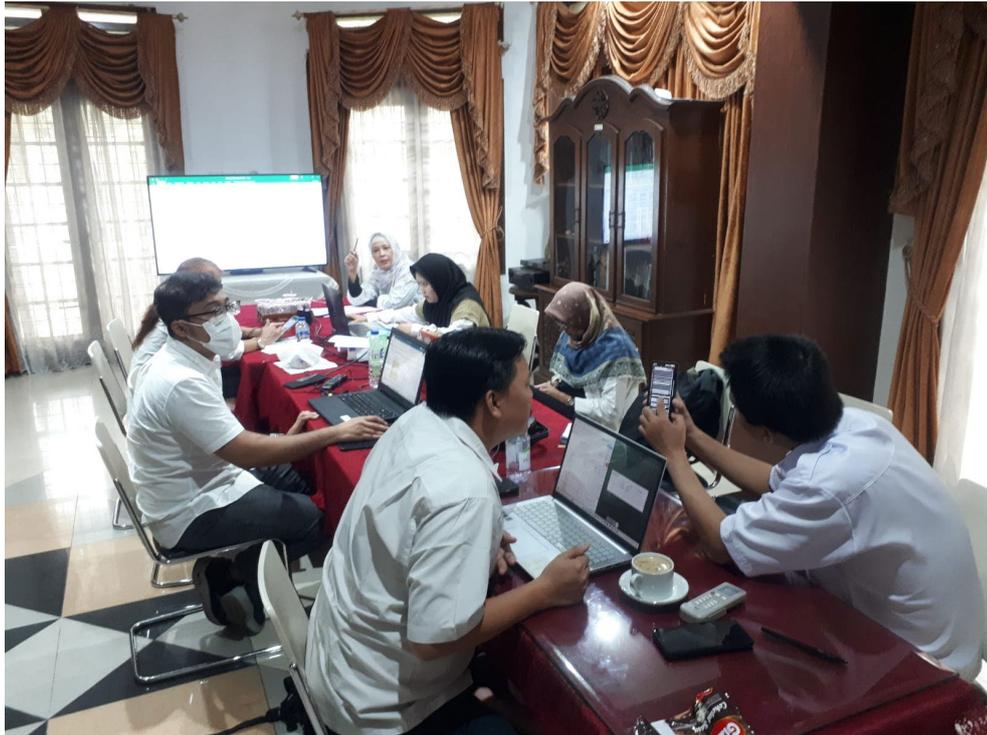
Capaian tersebut didukung dari:

- a. **Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** berupa nilai PKKI sebesar 90,85.

- Membuat Forum BABE (Belajar Akuntansi Bersama)

Penyelenggaraan forum belajar akuntansi bersama yang dihadiri oleh Petugas Akuntansi, Pengurus Barang (Aset Tetap dan Aset Lancar), Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan membahas rekonsiliasi Aset Tetap, Aset Lancar, Belanja dan Pendapatan dalam rangka penyusunan kaporan keuangan akhir tahun.

Gambar III.5 Foto Forum BABE



Sumber : Banhubda DIY, 2024

Faktor Pendukung keberhasilan

- a. Kerja sama yang baik dengan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.
- b. Dilakukannya inovasi pada setiap kegiatan yang membantu pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik.

Faktor Penghambat keberhasilan

- a. Deadline pekerjaan yang kerap berbarengan
- b. Kebutuhan lapangan yang tidak dapat diprediksi secara mutlak

3.2. Capaian Kinerja Lainnya

a. Capaian kinerja Perangkat Daerah terhadap capaian sasaran Pemda DIY dan Program Pemda

Sebagaimana amanat cascading Kinerja Badan Penghubung Daerah DIY memiliki kontribusi pada pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah dan Program pemerintah Daerah sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel III.14 Kontribusi Tujuan dan Sasaran Badan Penghubung Daerah DIY terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Daerah

No	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Good Governance	1. Opini BPK 2. Nilai akuntabilitas Pemerintah (AKIP) 3. Indeks demokrasi Indonesia (IDI)	WTP AA	*) WTP AA	A. Meningkatnya capaian kinerja layanan penghubung dalam menunjang koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemangku Kepentingan lain di DKI Jakarta dan sekitarnya.	Persentase layanan penghubung yang berkualitas dalam menunjang koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan lain	87,5%	92,68%
					1. Meningkatnya kualitas layanan penghubung	Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Layanan Penghubung	87,5 angka indeks	92,83 angka indeks
					2. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Badan Penghubung Daerah DIY	A	A

Penjelasan :

1. Opini BPK WTP dan Nilai Akuntabilitas pemerintah (AKIP) dipengaruhi oleh kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada level pemerintah Daerah dan perangkat Daerah.
2. Badan Penghubung Daerah sebagai Perangkat Daerah yang memiliki ketugasan melaksanakan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat memiliki peran memfasilitasi aparatur Pemda DIY yang bertugas ke Ibu Kota.
3. Sebagai Perangkat Daerah mandiri, Badan Penghubung Daerah juga diukur keberhasilan tata kelolanya melalui Sasaran Penunjang Meningkatnya Tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah dengan indikator Kategori RB Perangkat Daerah.

Tabel III.15 Kontribusi Program Badan Penghubung Daerah DIY terhadap Capaian Program Pemerintah Daerah

No	Program Pemerintah Daerah	Indikator Program Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	Program Perangkat Daerah	Indikator Program PD	Target	Realisasi	%Realisasi
1	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	1. Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik 2. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Tinggi 86,07	Tinggi	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase layanan yang diberikan Banhudba DIY	100%	100%	100%
					PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase layanan pelestarian seni budaya daerah	100%	100%	100%

Penjelasan :

1. Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah diukur dengan indikator Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dipengaruhi oleh pengelolaan Program Pelayanan Penghubung dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Layanan Penghubung.
2. Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah diukur dengan indikator Tingkat

Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dipengaruhi oleh pengelolaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan indikator Persentase layanan pelestarian seni budaya daerah.

3.3. Analisis Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.16 Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran Belanja dan Efisiensi Anggaran Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (Rp)
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Meningkatnya capaian kinerja layanan penghubung dalam menunjang koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan lain di DKI Jakarta dan sekitarnya	Persentase layanan penghubung yang berkualitas dalam menunjang koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan lain	87,5	92,68	105,92	11.922.635.013	11.295.072.195	94,74	627.562.818
1.	Meningkatnya kualitas layanan penghubung	Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Layanan Penghubung	87,5	92,83	106,09	4.314.232.400	4.281.962.691	99,25	32.269.709
2.	Meningkatnya Tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di	Kategori Reformasi Birokrasi Badan Penghubung Daerah DIY	A	A	100%	7.608.402.613	7.013.109.504	92,18	595.293.109

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (Rp)
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perangkat Daerah								
Jumlah									627.562.818

Sumber: <http://sungguh.jogjaprovo.go.id/>, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penghubung Daerah DIY Tahun 2024, Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah DIY Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja sasaran Banhubda DIY melampaui target kinerja tahun 2024 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp 11.922.635.013,- terealisasi Rp 11.295.072.195,- atau 94,74% sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja telah efisien.

Terdapat efisiensi Rp 627.562.818,- atau 5,26% yang bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber
- Efisiensi uang transport peserta
- Sisa dari Gaji dan Tunjangan pegawai karena sesuai kebutuhan

3.4. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

- a. Pembentukan Forum Diaspora Yogyakarta Istimewa.
 Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Penghubung Daerah DIY Nomor 061/2979 tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Diaspora Yogyakarta Istimewa, Badan Penghubung Daerah DIY membentuk Forum Komunikasi Diaspora Yogyakarta Istimewa sebagai wadah meningkatkan aktivitas organisasi masyarakat perantauan Yogyakarta di Jabodetabek. Saat ini terdapat 8 (delapan) paguyuban yaitu Ikatan Keluarga Gunung Kidul, Badan Koordinasi Paguyuban Keluarga Kulon Progo,

Warga Keluarga Bantul, Paguyuban Warga Jogja Istimewa, Kulon Progo Di Jakarta, Warga Bantul Manunggal, Paguyuban Warga Yogyakarta, Sleman Manunggal Sembada. Forum ini diharapkan dapat lebih meningkatkan efektivitas kegiatan agar lebih berkembang.

- b. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi secara daring
- c. Pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri terkait penilaian arsip
- d. Pemeliharaan kendaraan mandiri oleh pengemudi
- e. Kampanye hemat energi dan hemat BBM
- f. Kerjasama dengan stakeholder dalam fasilitasi penginapan UMKM DIY yang berpameran di DKI Jakarta
- g. Pagelaran Ketoprak dengan Bintang Tamu dari Pejabat Tinggi Negara
- h. Pemutaran video dokumentasi pawai budaya Banhubda DIY di Lounge VVIP Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta
- i. Penyelenggaraan Kelas BABE (Belajar Akuntansi Bersama)
- j. Pembuatan Taman Pojok Pendopo Anjungan DIY TMII
- k. Kerja bakti pemeliharaan gorong – gorong
- l. Pemasangan Instalasi Listrik
- m. Pameran Produk Kesenian di Universitas Budi Luhur
- n. Pameran Kerja sama dengan BTN
- o. Kerja sama dengan Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta untuk pembuatan Video Promosi
- p. Pementasan Wayang, Ketoprak, Tari dan Uyon-uyon pada Kegiatan Ekspresi Seni Tradisi Malam Sukrokasih
- q. Latihan Diklat Karawitan Grup Sekneg yang dilatih oleh ASN Banhubda DIY
- r. Pementasan bersama Diklat Anjungan DIY TMII di Luar Daerah
- s. Memenangkan Lomba pada kegiatan Pawai di Tangerang
- t. Lomba Tari di Luar Jabodetabek
- u. Bazar UMKM pada Pagelaran Wayang Kulit Dalang Senior dalam rangka Grebeg 1Suro
- v. Kerja sama dengan Praja Jogjakarta
- w. Kerjasama dengan Brimob POLRI dan Praja Jogjakarta
- x. Efisiensi Anggaran penandatanganan DPA oleh TAPD DIY
- y. Pelatihan kantor sendiri penyusunan laporan tahunan Banhubda DIY
- z. Bimbingan Teknis Akuntansi secara Daring
- aa. Buku kendali SPJ
- bb. Langganan tahunan untuk efisiensi anggaran
- cc. Pelaksanaan Koordinasi dan konsultasi secara Daring
- dd. Digitalisasi pengiriman dokumen
- ee. Digitalisasi pengelolaan sampah

3.5. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat maka Badan Penghubung Daerah DIY sebagaimana cascading kinerja pada gambar 1.1 dan mandat kinerja sebagaimana tergambar pada gambar 1.2 melaksanakan optimalisasi lintas sektor. Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor tersebut dilaksanakan berlandaskan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9/INSTR/2021 tentang Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Optimalisasi kinerja Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor merupakan salah satu faktor pendukung Badan Penghubung Daerah DIY dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan ditengah kondisi *Refocusing* dan realokasi anggaran. Inventarisasi Lintas Sektor Badan Penghubung Daerah DIY adalah sebagai berikut:

Tabel III.17 Inventarisasi Lintas Sektor Badan Penghubung Daerah DIY

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
1.	Kegiatan Keprotokolan dan layanan penghubung lain	Koordinator dan pelaksana keprotokolan dan layanan penghubung lain	Fasilitasi Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Perangkat Daerah : - Biro Tata Pemerintahan - Sekretariat DPRD - Badan Kepagawaian Daerah - Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol - Badan Pengelola Keuangan dan Aset - Biro Hukum	Bagi OPD: Mendukung pencapaian tujuan OPD meningkatnya kinerja Kantor Perwakilan Daerah dalam mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah DIY dan menjamin terwujudnya hub yang efektif bagi hadirnya sinergi Pemerintah Daerah DIY dengan stakeholder terkait di Jakarta dan sekitarnya. Bagi Kelompok Sasaran: Terfasilitasinya tugas dan kepentingan mitra
		Biro Tata Pemerintahan	Menerima layanan Banhubda DIY			
		Sekretariat DPRD	Menerima layanan Banhubda DIY			
		Badan Kepegawaian Daerah	Menerima layanan Banhubda DIY			
		Biro Umum, Hubungan Masyarakat Dan Protokol	Menerima layanan Banhubda DIY			
		Badan Pengelola Keuangan Dan Aset	Menerima layanan Banhubda DIY			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
		Biro Hukum	Menerima layanan Banhubda DIY		<ul style="list-style-type: none"> - Biro Organisasi 2. Masyarakat 	
		Biro Organisasi	Menerima layanan Banhubda DIY			
		Dunia usaha	-			
		Perguruan Tinggi	-			
		Masyarakat	Menerima layanan Banhubda DIY			
2.	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Koordinator Fasilitasi Pameran Pekan Raya Indonesia Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk UMKM binaan DP3AP2 DIY (Desa Prima) Perguruan Tinggi	Fasilitasi Pelaksanaan Pameran Menerima layanan Banhubda DIY - -	Indeks kepuasan mitra yang terfasilitasi promosi	<ul style="list-style-type: none"> 1. 1 Perangkat Daerah 2. UMKM Desa Prima 3. Masyarakat 	Bagi OPD: Mendukung pencapaian tujuan OPD meningkatnya kinerja Kantor Perwakilan Daerah dalam mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah DIY dan menjamin terwujudnya hub yang efektif bagi hadirnya sinergi Pemerintah Daerah DIY dengan stakeholder terkait di Jakarta dan sekitarnya.

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
		Koordinator Fasilitas Pameran Jakarta Fair	Fasilitas Pelaksanaan Pameran			Bagi Kelompok Sasaran: Terfasilitasnya Pameran produk-produk UMKM dari Yogyakarta untuk dipasarkan di Jabodetabek.
		Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi DIY	Koordinator peserta Pameran			
		UMKM binaan Disperindagkop DIY	Peserta Pameran			
		Pemkot Bandung (KBM Ekowisata Jawa Barat dan Banten)	Sebagai mitra kerja sama			
		Perguruan Tinggi (Universitas Budi Luhur)	-			
		BTN (Bank Tabungan Negara)				
		Masyarakat	Penerima / penikmat hasil produk-produk UMKM			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
3.	Kegiatan Kesenian Bekerja sama dengan Diaspora Yogyakarta di Jakarta	Koordinator Fasilitasi Pameran Diaspora Yogyakarta di Jakarta	Fasilitasi Pelaksanaan Pameran	Indeks kepuasan mitra yang terfasilitasi promosi	1. UMKM Paguyuban Diaspora Yogyakarta di Jakarta 2. Masyarakat	<p>Bagi OPD: Mendukung pencapaian tujuan OPD Meningkatnya kinerja Kantor Perwakilan Daerah dalam mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah DIY dan menjamin terwujudnya hub yang efektif bagi hadirnya sinergi Pemerintah Daerah DIY dengan stakeholder terkait di Jakarta dan sekitarnya.</p> <p>Bagi Kelompok Sasaran: Terfasilitasinya Pameran produk-produk UMKM Paguyuban Diaspora Yogyakarta di Jakarta.</p>
		Instansi lain	-			
		UMKM Paguyuban Diaspora Yogyakarta di Jakarta	Peserta Pameran			
		Perguruan Tinggi	-			
		Masyarakat	Penerima / penikmat hasil produk-produk UMKM			
4.	Kegiatan Pentas Seni Budaya	Koordinator Pelaksanaan Pentas Seni Budaya	Fasilitasi Pelaksanaan Pentas Seni Budaya Yogyakarta	Persentase peningkatan Budaya tak benda yang dilestarikan	1. 3 Instansi 2. Paguyuban Diaspora Yogyakarta di Jakarta 3. Masyarakat	<p>Bagi OPD: Mendukung pencapaian tujuan OPD Meningkatnya kinerja Kantor Perwakilan Daerah dalam mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah DIY dan menjamin terwujudnya hub yang efektif bagi hadirnya sinergi</p>
		PT. Angkasa Pura II	Penyedia tempat untuk tampil ke publik			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
		RRI Pusat	Penyedia tempat untuk tampil ke publik			<p>Pemerintah Daerah DIY dengan stakeholder terkait di Jakarta dan sekitarnya.</p> <p>Bagi Kelompok Sasaran: Pengenalan Seni Budaya Yogyakarta di Instansi yang terlibat</p>
		Taman Mini Indonesia Indah	Penyedia tempat untuk tampil ke publik			
		Paguyuban Diaspora Yogyakarta di Jakarta	Pelaku Seni			
		Perguruan Tinggi	-			
		Masyarakat	Penerima / penikmat seni budaya Yogyakarta			
		Koordinator Pelaksanaan Ketoprak Menteri/Duta Besar	Fasilitasi Pelaksanaan Ketoprak	Pelaksanaan pentas ketoprak dengan menampilkan bintang tamu pejabat negara atau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instansi 2. Paguyuban 3. Kagama 4. Masyarakat 	
5.	Kegiatan Ketoprak Menteri/Duta Besar	Paguyuban Warga Kota Yogyakarta (Pawarta Jogja)	Mitra Kerja sama			
		Keluarga Alumni Gadjah Mada (Kagama) Depok	Mitra Kerja sama			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
		Masyarakat	Penerima / penikmat Ketoprak	pejabat kedutaan		
6.	Kegiatan Pengembangan Industri Kreatif	Koordinator Fasilitasi Pameran Jakarta Fair	Fasilitasi Pelaksanaan Pameran	Indeks kepuasan mitra yang terfasilitasi promosi	1. 1 Perangkat Daerah 2. UMKM DIY 3. Masyarakat	Bagi OPD: Mendukung pencapaian tujuan OPD meningkatnya kinerja Kantor Perwakilan Daerah dalam mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah DIY dan menjamin terwujudnya hub yang efektif bagi hadirnya sinergi Pemerintah Daerah DIY dengan stakeholder terkait di Jakarta dan sekitarnya. Bagi Kelompok Sasaran: Terfasilitasinya Pameran produk-produk UMKM dari Yogyakarta untuk dipasarkan di Jabodetabek.
		Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi DIY	Koordinator peserta Pameran			
		JIEXpo Kemayoran	Penyelenggara			
		UMKM binaan Disperindagkop DIY	Peserta Pameran			
		Perguruan Tinggi	-			
		Masyarakat	Penerima / penikmat hasil produk-produk UMKM			

BAB IV Penutup

Bab IV berisi :

1. Kesimpulan
2. Langkah Perbaikan Kinerja

4.1. Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Badan Penghubung Daerah DIY tahun 2024 dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1. Sasaran Banhubda DIY yaitu meningkatnya kualitas layanan penghubung dengan Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Layanan Penghubung. Pada tahun 2024 target sasaran Badan Penghubung Daerah DIY sebesar 87,5 angka indeks, terealisasi sebesar 92,83 angka indeks atau 106,09% di atas target. Dengan demikian, target kinerja Badan Penghubung Daerah DIY pada tahun 2024 dapat tercapai dengan baik. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan memiliki nilai tambah karena dilaksanakan dengan cara bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan terkait.
2. Sasaran Banhubda DIY yaitu meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah di perangkat daerah dengan indikator Kategori Reformasi Birokrasi Badan Penghubung Daerah DIY. Pada tahun 2024 target sasaran Badan Penghubung Daerah DIY adalah A atau setara dengan nilai 2, sementara realisasinya adalah A atau setara dengan nilai 2. Sehingga tercapai target 100%. Persentase 100% ini berasal dari capaian target indikator pada tahun 2024 yaitu A (2) terhadap target tahun 2023 yaitu A (2), oleh karena itu dilakukan dengan rincian perhitungan ($2/2 \times 100\% = 100\%$). Dengan demikian, target kinerja Badan penghubung Daerah pada tahun 2024 dapat tercapai dengan baik.

3. Permasalahan atau hambatan yang terjadi antara lain pelayanan penginapan kurang optimal, kamar perlu ditingkatkan kebersihannya dan belum tersedia resepsionis di penginapan dan kualitas pengelolaan kegiatan kesenian perlu ditingkatkan agar kualitas pelaksanaan kegiatan lebih meningkat menuju Badan Penghubung Daerah DIY sebagai pusat seni budaya Yogyakarta di Jakarta.
4. Faktor kunci keberhasilan antara lain meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, PT. Bhumi Visata Indonesia selaku pengelola Taman Mini Indonesia Indah, Forum Komunikasi Pemerintah Penghubung Seluruh Indonesia, dan mitra kerja sama pelaksanaan kegiatan kesenian di TMII dan di Jabodetabek; meningkatkan fasilitas kamar penginapan di Griya Jogja dan Wisma Jogja; menyelenggarakan kegiatan diskusi kepegawaian secara rutin agar kerja sama dan semangat kerja pegawai dapat terjaga dengan baik karena manajemen kepegawaian menjadi salah satu kunci keberhasilan pencapaian target kinerja; dan Meningkatkan komunikasi agar kualitas kerja sama dengan diaspora Yogyakarta di Jakarta dapat lebih optimal.

4.2. Langkah Perbaikan Kinerja

Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan penginapan dengan peningkatan kebersihan kamar dan optimalisasi pegawai yang bertugas sebagai petugas resepsionis.
2. Optimalisasi pengelolaan kegiatan kesenian dengan :

- Bekerjasama dengan berbagai entitas penyelenggara diklat kesenian dalam penyusunan kurikulum yang adaptif terhadap perubahan dan berkelanjutan.
- Pembuatan short movie atau mini clip yang bersumber dari kegiatan seni yang sudah dilaksanakan dan menampilkannya di media sosial serta menggunakannya sebagai alat peraga sosialisasi kegiatan Badan Penghubung Daerah DIY baik di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) maupun tempat lain yang lebih luas.
- Memproduksi video rekaman proses latihan tari sehingga dapat dipublikasikan dan menjangkau masyarakat yang lebih luas.
- Bekerjasama dengan kementerian yang strategis dalam pelaksanaan pentas seni bersama agar Badan Penghubung Daerah DIY dapat dikenal lebih luas.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja Tujuan/Sasaran (Baseline 2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir Tahun (2027)
						Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Tahun ke-5 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya capaian kinerja layanan penghubung dalam menunjang koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan lain di DKI Jakarta dan sekitarnya	persentase layanan penghubung yang berkualitas dalam menunjang koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan lain			n/a	87%	87,5%	88%	88,5%	89%	89%
			Meningkatnya kualitas layanan Penghubung	nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Layanan Penghubung	n/a	87 angka indeks	87,5 angka indeks	88 angka indeks	88,5 angka indeks	89 angka indeks	89 angka indeks
			Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Badan Penghubung Daerah DIY	A	A	A	A	A	A	A

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2024



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENGHUBUNG DAERAH
BANHUBDA

Jalan Diponegoro No. 52 Menteng Jakarta Pusat, Telp. (021) 31938108, 3142545, Fax. (021) 3907508
Web site: www.kaperda.jogjaprov.go.id, e-mail: kaperda@jogjaprov.go.id Kode Pos 10310

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, terkait adanya penetapan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUGROHONINGSIH, S.IP
Jabatan : Kepala Badan Penghubung Daerah DIY
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HAMENGKU BUWONO X
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

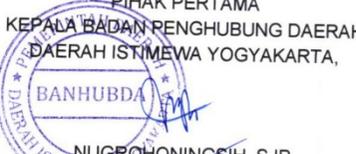
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Oktober 2024

PIHAK KEDUA
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

BANHUBDA
NUGROHONINGSIH, S.IP
NIP 197012131997032005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TUJUAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Perangkat Daerah : Badan Penghubung Daerah DIY
 Jabatan : Kepala Badan Penghubung Daerah DIY

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya capaian kinerja layanan penghubung dalam menunjang koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan lain di DKI Jakarta dan sekitarnya	persentase layanan penghubung yang berkualitas dalam menunjang koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan lain	%	87,5	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	87,5 87,5 87,5 87,5*)

Keterangan:

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN SASARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Perangkat Daerah : Badan Penghubung Daerah DIY
 Jabatan : Kepala Badan Penghubung Daerah DIY

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Penghubung	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Layanan Penghubung	%	87,5	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	87,5 87,5 87,5 87,5*)
2.	Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kategori	A (87,55)	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	A(87,55) A(87,55) A(87,55) A(87,55)*)

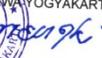
Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program Perangkat Daerah	Anggaran
1.	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG (APBD)	Rp 190.213.600
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN (DAIS)	Rp 4.124.018.800
3.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (APBD)	Rp 7.608.402.613
	Jumlah Anggaran	Rp 11.922.635.013

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Jakarta, 29 Oktober 2024

PIHAK KEDUA
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGRU BUWONO X



PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NUGROHONINGSIH, S.IP
NIP. 197012131997032005



- f. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 052/II/INSP/2024 untuk melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah pada Badan Penghubung Daerah DIY.

2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, termasuk pada Perangkat Daerah merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah DIY.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP Perangkat Daerah;
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi yaitu pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

6. 

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Badan Penghubung Daerah DIY dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 104 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penghubung Daerah.

Sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 104 Tahun 2022 bahwa Badan Penghubung Daerah DIY mempunyai tugas "melaksanakan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat".

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Badan Penghubung Daerah DIY mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Badan;
- b. penyelenggaraan informasi pemerintahan, pembangunan dan masyarakat;
- c. pemberian pelayanan penunjang terhadap kegiatan perangkat daerah di Jakarta;
- d. pemberian pelayanan penunjang terhadap masyarakat DIY yang ada di Jakarta;
- e. pengelolaan anjungan DIY di Taman Mini Indonesia Indah;
- f. penyelenggaraan dan fasilitasi promosi potensi dan seni budaya DIY oleh perangkat daerah di Jakarta, Jawa Barat dan Banten;
- g. penyelenggaraan hubungan antar lembaga;
- h. penyelenggaraan keprotokolan;
- i. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan;
- j. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi diaspora DIY se-Indonesia;
- k. fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Badan;
- l. fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Badan;
- m. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- n. pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;

o. pengevaluasian

- o. pengevaluasian dan penyusunan laporan pelaksanaan program Badan; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Penghubung Daerah DIY memiliki susunan struktur organisasi terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Subbidang Anjungan;
- d. Subbidang Promosi;
- e. Subbidang Hubungan Lembaga dan Pelayanan;
- f. Jabatan Fungsional.

7. Gambaran Umum Implementasi AKIP Perangkat Daerah

Implementasi AKIP pada Badan Penghubung Daerah DIY dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Pada aspek perencanaan kinerja, Badan Penghubung Daerah DIY telah memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.
- b. Pada aspek pengukuran kinerja, telah terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja, serta dilakukan secara berkala.
- c. Pada aspek pelaporan kinerja, Badan Penghubung Daerah DIY telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), memformalkan, serta mempublikasikan dokumen pelaporan tersebut.
- d. Pada aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang yang melibatkan seluruh unsur dalam organisasi. Dalam rangka peningkatan manajemen kinerja, Badan Penghubung Daerah DIY telah menggunakan Aplikasi Sengguh dalam rangka pengendalian dan evaluasi kinerja instansi. Dalam pengelolaan sumber daya manusia telah digunakan Aplikasi ASN Memayu sebagai sarana pengisian capaian kinerja pada tingkat individu.

8. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

Terhadap rekomendasi atas evaluasi tahun sebelumnya, Badan Penghubung Daerah DIY telah menindaklanjuti dengan:

- Menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan;

- Meningkatkan 

- Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal dalam rangka pencapaian Indikator Sasaran Badan Penghubung Daerah DIY yang dilakukan lintas seksi maupun dengan pemangku kepentingan terkait
- Meningkatkan inovasi, gagasan, dan ide kreatif dalam rangka pencapaian kinerja.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Badan Penghubung Daerah DIY memperoleh nilai sebesar 86,84. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

- Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 27,63 atau 92,09% dari bobot sebesar 30%;
- Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 25,51 atau 85,05% dari bobot sebesar 30%;
- Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,71 atau 84,76% dari bobot sebesar 15%;
- Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 20,98 atau 83,93% dari bobot sebesar 25%.

2. Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Kepala Badan Penghubung Daerah DIY agar meningkatkan kualitas evaluasi AKIP, diantaranya dengan meningkatkan kualitas LKjIP dan pendampingan tugas SDM pelaksana Evaluasi AKIP.

C. PENUTUPAN

1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa Badan Penghubung Daerah DIY memperoleh nilai 86,84. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan.

2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Penghubung Daerah DIY diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara

berjenjang

berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah DIY. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Badan Penghubung Daerah DIY secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penghubung Daerah DIY Tahun 2023, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


INSPEKTORAT
M. MUHAMMAD SETIADI, S.Pt., M.Acc.
NIP. 196710041992031005

Tembusan:
Gubernur DIY

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi AKIP Tahun 2023

B



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENGHUBUNG DAERAH

ꦧꦢꦤ꧀ꦥꦁꦲꦸꦧꦸꦁꦢꦂꦪ

Jalan Diponegoro No 52 Menteng Jakarta Pusat, Telp. (021) 31938108, 3142545, Fax. (021) 3907508
Website: www.kaperda.jogjaprovo.go.id, e-mail: kaperda@jogjaprovo.go.id Kode Pos 10310

TANGGAPAN/TINDAK LANJUT EVALUASI LKJIP TAHUN SEBELUMNYA BADAN PENGHUBUNG DAERAH DIY

REKOMENDASI LHE SAKIP (Surat Inspektur DIY Nomor 700/511 tanggal 21 Maret 2024)	TINDAK LANJUT
Meningkatkan kualitas evaluasi AKIP, diantaranya dengan meningkatkan kualitas LKJIP dan pendampingan tugas SDM pelaksana Evaluasi AKIP	Melakukan pendampingan tugas SDM pelaksana Evaluasi AKIP dan mengirim petugas pelaksana Evaluasi AKIP pada pelatihan penyusunan AKIP.

Jakarta, Maret 2024


NUGROHONINGSIH, SIP
NIP. 197012131997032005

Lampiran 5. Lain lain



PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA